

Buletin

INF BPPSDMP

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

Edisi April 2016



KEMANTAN & BULOG

SERAP GABAH



humassdm@gmail.com



bppsdp.pertanian.go.id



[bppsdp.pertanian](https://www.facebook.com/bppsdp.pertanian)



[humassdm](https://www.instagram.com/humassdm)



[humassdm](https://twitter.com/humassdm)



[bppsdp.kemantan.ri](https://www.youtube.com/bppsdp.kemantan.ri)

Salam Redaksi



Dr. Ir. Momon Rusmono, MS
Sekretaris Badan PPSDMP

Salam hangat dan salam sejahtera bagi para pembaca yang setia mengikuti perkembangan informasi dan berita yang disajikan oleh Buletin "Info BPPSDMP". Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pada tahun 2016 ini kita telah memasuki tahun ketiga penerbitan Buletin "Info BPPSDMP" dan kami tetap berkomitmen untuk memberikan sajian informasi terbaru dan berita seputar program/kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Buletin "Info BPPSDMP" yang ditujukan kepada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, UPT lingkup BPPSDMP, Satker Dana Dekonsentrasi dan lembaga yang terkait, diharapkan mampu menjadi media publikasi yang bersifat aktual dan informatif guna mendukung kinerja BPPSDMP baik secara eksternal maupun internal.

Pada edisi April Tahun 2016 sebagai Headline kami menyajikan berita mengenai "Selamatkan Harga di Petani, Kementan dan Bulog Serap Gabah". Untuk rubrik lainnya kami juga menyajikan berita kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing pusat lingkup BPPSDMP. Kami selalu mengharapkan dukungan, saran serta masukan dari segenap pihak untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Buletin ini.

Semoga buletin "Info BPPSDMP" Edisi Bulan April tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah informasi serta pengetahuan para Pejabat/Staf Lingkup BPPSDMP pada khususnya, dan Pejabat/Staf lingkup Kementerian Pertanian pada umumnya.

INFO BPPSDMP

Editorial

PENASEHAT

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

DEWAN PEMBINA

Sekretaris Badan PPSDMP
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian
Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

REDAKTUR PELAKSANA

Kepala Sub Bagian Humas

DEWAN REDAKSI

Eko Saputra, Marresya Dessilvia, Tri Harno, Festi Agustiani

DESIGN GRAFIS

Daimatus Pito Banugroho

DISTRIBUSI

Emalatuconsina

ADMINISTRASI

Deti Ugi Rustini, C. Sulistyow

PENERBIT

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

KANTOR REDAKSI

Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D. Lt. 7. Jl. Harsono RM
No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, Kode Pos
7214/JKSPM, Telp. 021 7804257, Email
humassdm@gmail.com

DAFTAR ISI



Head Line



**SELAMATKAN HARGA DI PETANI,
KEMANTAN DAN BULOG SERAP GABAH**

Info Sekretariat



**UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
Untuk Petani Lebih Sejahtera**

Info Penyuluhan



Diklat Teknis Peternakan Berbasis Internet

Info Pendidikan



**KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDAMPINGAN
MAHASISWA/ALUMINI DALAM RANGKA PENCAPAIAN
SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN
WILAYAH KOORDINASI STPP MEDAN TAHUN 2016**

Info Pelatihan



**Pusat Penyuluhan Pertanian Kaji Ulang
Kebutuhan SKKNI Sektor Pertanian**

Serba-Serbi



**Bimbingan Teknis Manajemen Pimpinan
Kelembagaan Penyuluhan Tingkat
Kecamatan Tahun 2016**



SELAMATKAN HARGA DI PETANI, KEMANTAN DAN BULOG SERAP GABAH



Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Badan Urusan Logistik, Pihak Perbankan dan TNI-AD dalam menanggulangi turunnya harga gabah ditingkat petani melakukan penganan program penyerapan gabah nasional di 6 (enam) provinsi sentra produksi padi, salah satunya di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini di Kabupaten Sragen masih didapati harga GKP nya dibawah harga yang ditetapkan pemerintah. Penganan ini dilakukan bersamaan dengan Panen Raya oleh Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman yang dilaksanakan pada, Senin (14/3/16) di areal 150 ha dengan mengusung tema **“Panen, Serap Gabah, Harga Stabil”**.

Berdasarkan data yang didapat, harga GKP di tingkat petani saat ini Rp.3.200–3.300/kg, harga GKP dari pengepul Rp.3.500–3.700/kg, harga GKG dari pengepul Rp.4.800/kg. Harga tersebut membuat tekanan terhadap petani dengan rendahnya harga yang diterima khususnya pada saat panen dan kondisi ini mengakibatkan petani semakin terpuruk. Sedangkan Pemerintah telah menetapkan target harga penyerapan GKP ditingkat petani Rp. 3.700/kg dan harga GKG di gudang Bulog Rp.4.650/kg.

Kabupaten Sragen mempunyai luas areal tanam seluruhnya 41.164 ha dan telah panen 36.481 ha, sedangkan luas tanam yang belum dipanen hingga saat ini 4.683 ha. Dari data tersebut dapat diperhitungkan Gabah Kering Panen (GKP) yang akan diserap Bulog sebanyak 32 – 33 ribu ton dari sisa luas tanam yang belum panen.





Sementara itu, Mentan mengatakan pemerintah Indonesia telah menyediakan anggaran untuk menyerap gabah hasil panen petani pada tahun ini melalui Perum Bulog untuk menyediakan pangan Nasional. “Pemerintah sudah menyediakan anggaran Rp. 20 triliun dengan target pengadaan pangan menyerab gabah petani sekitar empat hingga lima juta ton setara beras”, ujar Mentan.

Bahkan, Mentan juga meminta kepada penyuluh pertanian untuk selalu mendampingi para petani agar bisa membantu menyerap gabah hasil panen di wilayahnya untuk disetorkan ke Bulog. 404 orang Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swadaya yang berada di wilayah Kabupaten Sragen, beserta TNI-AD, yang terdiri dari 208 orang Babinsa diterjunkan untuk mendampingi dan membantu tata niaga penyerapan gabah petani sehingga selisih harga yang berdampak merugikan petani dapat dihindari. “Penyuluh mengawal gabah hasil panen petani untuk disetorkan ke Bulog”, tegasnya. Gerakan ini sebagai wujud nyata Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani. Bekerjasama dengan Bulog, program ini diharapkan dapat menjamin petani menerima harga yang pantas. Mentan berharap dengan menyerap gabah langsung kepada petani dapat memotong mata rantai dagang beras sehingga harga pangan pokok di masyarakat stabil. Adanya jaminan harga beli di petani mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional. (Cha)





UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Untuk Petani Lebih Sejahtera



(Mataram,NTB) Kontribusi nyata petani dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan tidak boleh dipandang sebelah mata. Untuk itu petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan secara jelas dan tegas, baik dalam jaminan kapasitas hukum maupun keadilan bagi petani dan pelaksana usaha.

Upaya Kementerian Pertanian memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani terus diupayakan salah satunya dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara terus menerus disosialisasikan kepada para petani dan penyuluh serta pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), saat melakukan sosialisasi UU Nomor 19/2013 tanggal 23 Maret 2016 mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka sinergitas dan mempercepat penyampaian informasi terhadap tindak lanjut perundang-undangan kepada pemangku kepentingan.

Dihadapan para penyuluh tingkat provinsi dan kabupaten serta anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Pending Dadih Permana mengharapkan agar mereka menularkan kembali informasi yang sudah diperoleh kepada petani.

Pending Dadih Permana melanjutkan bahwa terbitnya UU

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikarenakan UU yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan secara jelas, tegas dan lengkap. Untuk itu petani harus diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang, guna mewujudkan kedaulatan pangan secara berkesinambungan.

Bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani seperti diungkapkan Pending Dadih adalah melalui kebijakan yang berpihak kepada petani seperti pengaturan import komoditas pertanian harus sesuai dengan musim panen atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

Selain itu penyediaan sarana produksi pertanian harus tepat waktu, tepat mutu, harga terjangkau bagi petani, subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean.

Kebijakan lainnya adalah penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen, bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim dan resiko lainnya, Pending Dadih mengatakan perlunya fasilitasi asuransi pertanian untuk menekan kerugian yang dialami oleh petani.



“Pemerintah juga dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara” kata Pending Dadih.

Sementara itu, upaya pemberdayaan petani juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir para petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkembangkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusaha tani.

Pending Dadih menambahkan bahwa diperlukan kegiatan yang mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya saing. Kegiatan tersebut antara lain melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dan pendampingan pertanian.

Kegiatan pemberdayaan lainnya yang bisa diupayakan adalah pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi dan penguatan kelembagaan petani.

UU Perlindungan dan Pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. UU ini juga untuk melindungi petani dari gagal panen dan resiko harga, penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Selain itu untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

“Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu pada intinya adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik” kata Pending Dadih Permana mengakhiri sambutannya. (tri)





Diklat Teknis Peternakan Berbasis Internet



Dalam rangka mendukung tercapainya swasembada daging sapi pada pemerintahan Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian mengembangkan Program pemberdayaan peternak sapi melalui program Sekolah Peternak Rakyat (SPR) yang dimonitoring dan dievaluasi melalui sistem internet.

Untuk mengembangkan fasilitas budidaya dan pemasaran agribisnis peternakan modern, maka pada tahun ini dikembangkan 50 SPR yang tersebar di 17 propinsi dan 40 kabupaten. Setiap SPR dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana peternakan atau dokter hewan dengan fasilitasi dana miliaran rupiah per SPR.

BPPSDMP yang mengemban tugas untuk pendampingan penyuluh baik di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Provinsi/Pusat melaksanakan Diklat Teknis Peternakan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2016. Diklat Teknis ini merupakan salah satu upaya nyata dalam rangka mendukung kegiatan SPR ini melalui rekayasa sosial dan pemberdayaan pengelola dan petani SPR dengan pendampingan penyuluhan berbasis internet.

Peserta Diklat Teknis ini adalah para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan menghadirkan narasumber yang dimiliki balai-balai diklat peternakan di lingkup BPPSDMP. Materi yang diberikan antara lain aspek manajerial pengelolaan manajemen budidaya ternak sapi zero waste dengan teknologi modern dan aspek teknis teknologinya. Selanjutnya para penyuluh ini akan melatih dan mendampingi para

manajer SPR, Ketua Gugus Pemilik Ternak (GPT) dan peternaknya.

Seluruh PPL yang dilibatkan untuk memberdayakan SPR datanya, termasuk telepon genggam dan alamat email, tersimpan dalam Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) berbasis internet yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan. Demikian pula data SPR, manajer dan anggota peternaknya.

Pusluhtan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dapat memonitoring SPR melalui Telepon Genggam maupun komonukasi internet video call.

Dalam kegiatan Diklat Teknis Peternakan di BP3K Cipunagara, Subang diperlihatkan komunikasi video call berbasis internet antara Dirjen PKH Muladno dengan pengelola SPR di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Pending Dadih Permana menyatakan bahwa bantuan dan fasilitasi dana untuk SPR berasal dari APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Diharapkan melalui pengembangan SPR ini akan menjadi perusahaan peternakan berbadan hukum milik rakyat dengan pengelolaan manajemen dan peralatan yang modern yang dapat bersaing dan lebih maju dibanding perusahaan penggemukan sapi yang ada saat ini. (Nurlaily).



KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDAMPINGAN MAHASISWA/ALUMNI DALAM RANGKA PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN WILAYAH KOORDINASI STPP MEDAN TAHUN 2016



Bertempat dikantor Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi pendampingan mahasiswa/alumni dalam rangka pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan wilayah koordinasi STPP Medan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua STPP Medan Dr. Drs. Susanto, MSi adapun yang hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Ir. John Albertson, Kepala Bakorluh Sumatera Utara Ir. Bonar Sirait, MSi , dan Pabanda Wanwil Ster Kodam I/BB Teuku Hamdani,ST, kelompok pendampingan Unand, Unsia, USUdan dosen serta pejabat struktural STPP Medan.

Pada Rapat ini bertindak sebagai nara sumber, ketua STPP Medan memaparkan tentang pelaksanaan pendampingan mahasiswa/alumni dan dosen dalam rangka pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan di wilayah koordinasi STPP Medan, Kepala Bidang

Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan GP-PTT, RJIT, POL, bantuan Alsintan, bantuan pupuk, PAT kedelai, PAT jagung, dan Program pengembangan komoditas bawang merah, cabe, daging sapi dan tebu di Provinsi Sumatera Utara, sementara Kepala Bakorluh Sumatera Utara memaparkan tentang program pendampingan gerakan pemberdayaan petani terpadu di Provinsi Sumatera Utara dan dari Pabanda Wanwil Ster Kodam I/BB menyampaikan dukungan TNI-AD dalam rangka pendampingan dan pengawalan kegiatan pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan di wilayah turitorial Sumatera Utara.

Di akhir acara, Pak Santo menambahkan, agar dengan adanya dukungan dari Wabinsa, Bakorluh serta dinas terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan mahasiswa/alumni tahun 2016 bisa lebih .

(Ira Lisyani/Merlyn Mariana)



Pusat Penyuluhan Pertanian Kaji Ulang Kebutuhan SKKNI Sektor Pertanian

Menyadari akan pentingnya tenaga kerja sektor pertanian yang kompeten dan berdaya saing untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Standardisasi tanggal 28 s.d 30 Maret 2016 di Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan Standar Kerja Nasional Indonesia.

Standar kompetensi kerja pada sektor pertanian merupakan suatu tuntutan agar profesionalisme SDM Pertanian memiliki daya saing terhadap peluang kerja, dan mendapat pengakuan masyarakat. Untuk itu diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di sektor pertanian. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. DEV dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional, SKKNI/KKNI mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia. Dengan posisi tersebut, maka SKKNI/KKNI dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi dan perusahaan swasta sebagai acuan dalam pengembangan program dan kurikulum, rekrutmen dan

pengembangan karyawan, penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

BPPSDMP melalui Pusat Pelatihan Pertanian telah menetapkan arah kebijakan Penyiapan sumberdaya manusia pertanian yang profesional dan berdaya saing menghadapi pasar bebas/Masyarakat Ekonomi ASEAN. Upaya ini ditempuh dengan pendekatan pengembangan sumberdaya manusia pertanian berbasis kompetensi melalui 3 (tiga) pilar yaitu : Penyusunan dan pengembangan SKKNI/KKNI sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi oleh Lembaga Diklat Profesi (LDP), dan Sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor pertanian.





Pending mengatakan strategi pengembangan tenaga kerja sektor pertanian menurut arah kebijakan SDM pertanian dapat ditempuh melalui 4 (empat) cara yaitu pertama, Pengembangan dan penerapan SKKNI / KKNI sektor pertanian. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 53 tahun 2015 telah memberlakukan 31 (tiga puluh satu) SKKNI. Untuk itu beliau menghimbau kepada LDP dan LSP serta perusahaan swasta yang bergerak di sektor pertanian untuk segera mengimplementasikan SKKNI dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) yang belum mempunyai SKKNI/KKNI atau baru ada Standar Kompetensi Khusus (SKK) untuk segera mengusulkan judul SKKNI agar dapat disusun standarnya secara nasional.

Kedua, Penumbuhan dan pengembangan LSP dan penguatan LDP sektor pertanian. Dimana sampai akhir Desember 2015, BPPSDMP telah menumbuhkembangkan LSP sektor pertanian sebanyak 6 (enam) LSP dan 10 (sepuluh) Calon LSP sektor pertanian yang sedang dalam proses pembentukan. Selain itu, sudah dibentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebanyak 31 unit dan 10 (sepuluh) Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Yang ketiga, Menstimulasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pertanian. Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 melalui LSP Pertanian telah mensertifikasi sekitar 5500 orang tenaga kerja dengan beragam profesi pertanian.

Keempat, Mendorong pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan/pendidikan berbasis kompetensi pada sektor pertanian. Pending mengharapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang ada di lembaga diklat mengarah pada SKKNI sektor pertanian, sehingga para lulusan bisa mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pendukung ijazah yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri.

Dan yang terakhir yaitu mendorong perjanjian dan pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sektor pertanian di lingkup ASEAN. Untuk bisa setara dengan ASEAN, tenaga kerja sektor pertanian memiliki peluang yang besar, untuk itu "kita prioritaskan SKKNI/KKNI sektor pertanian untuk di setarakan pada tingkat ASEAN sehingga tenaga kerja kita di tingkat ASEAN ada perlakuan yang sama" ujar Pending.

Hasil dari pertemuan ini diharapkan agar para peserta dapat mengusulkan judul SKKNI/KKNI yang dibutuhkan dan memberikan masukan terkait dengan standar kompetensi yang sudah kedaluarsa dan yang sulit untuk di implementasikan. Selanjutnya Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian akan menyusun SKKNI/KKNI dan mengkaji ulang sesuai dengan skala prioritas.





Bimbingan Teknis Manajemen Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Tahun 2016



Dalam upaya mensukseskan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mencanangkan program aksi gerakan pemberdayaan petani, melalui pendekatan sistem penyuluhan, pendidikan dan pelatihan guna mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional.

Permasalahan yang mendasar dalam mewujudkan target Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antara lembaga yang membidangi pertanian di Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Guna meningkatkan sinergitas dan koordinasi tersebut, maka perlu adanya penataan kembali mekanisme dan tata hubungan kerja antar lembaga yang membidangi pertanian mulai Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan strategis nasional khususnya padi, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah, tebu, daging sapi/kerbau, BP3K memiliki peran penting sebagai Pos Simpul Koordinasi Program dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pembangunan di Kecamatan. Untuk itu maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.

Guna memberikan pemahaman pimpinan BP3K dalam manajemen pengelolaan BP3K serta meningkatkan kerjasama lembaga-lembaga teknis (Dinas Kabupaten/Kota, BP4K dan BPTP) yang membidangi

pertanian dalam mendukung peningkatan peran dan kinerja BP3K, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen dan Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Tahun 2016 di Fave Hotel Langko Mataram pada tanggal 1-4 Maret 2016.

Bimbingan Teknis Manajemen dan Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Tahun 2016 dibuka dan diresmikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan dihadiri oleh peserta yang berjumlah 150 orang yang terdiri dari Pimpinan BP3K, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi. Narasumber pada kegiatan ini antara lain Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala BPTP Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Tengah, Kepala BP3K Kec. Kediri, Kab Lombok Barat dan Dr.Ir.Winny Dian Wibawa, M.Sc

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan manajemen Pimpinan BP3K/ Koordinator Penyuluh Pertanian dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan peran dan kinerja BP3K. (lely)

